

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
(PPAS APBD T.A. 2016)**



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2015**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 170 / 107 / DPRD / VIII / 2015

NOMOR : 180 / 23 / SIDRAP/ VIII / 2015

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. RUSDI MASSE**
Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Harapan Baru (Kompleks Gabungan SKPD) Blok A
No.1A Batu Lappa Kabupaten Sidenreng Rappang

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Nama : **H. ZULKIFLI ZAIN**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng
2. Nama : **H. IKHSAN RAKIB**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng
3. Nama : **ARIFIN DAMIS**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap pagu dan prioritas APBD untuk mencapai sasaran program Tahun 2016.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Pangkajene, 13 Agustus 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

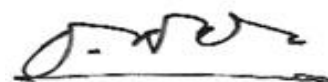


(H. RUSDI MASSE)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



(H. ZULKIFLI ZAIN)
KETUA



(H. IKHSAN RAKIB)
WAKIL KETUA



(ARIFIN DAMIS)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	3
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	5
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN Pemerintahan dan Program/Kegiatan	26
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	26
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.....	28
4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	28
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	9
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	10
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	30
BAB VI PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016	3
Tabel 3.1	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang	7
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	26
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	28
Tabel 5.1	Rincian Tentang Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) melalui tahapan : (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (2) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; serta (3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Melalui tahapan yang telah diuraikan di atas, dokumen PPAS Kabupaten Sidenreng Rappang memuat rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2014. Substansi dokumen PPAS dimaksud meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Dalam melaksanakan dinamika roda penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu tahun anggaran diperlukan pedoman, petunjuk dan ketentuan umum serta menjadi acuan sebagai tolok ukur anggaran kinerja pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam suasana kondisi kondusif.

Adapun tujuan penyusunan PPAS sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;

3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;

Oleh karena itu, sebagai dasar dalam menyusun anggaran sangat diperlukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Landasan yuridis formal dalam penyusunan PPAS secara hierarki dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- i. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.
- j. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam KUA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2016
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	955.231.419.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	64.628.524.000
1.1.1	Pajak Daerah	16.679.705.000
1.1.3	Retribusi Daerah	33.184.946.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.885.895.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.877.978.000
1.2	Dana Perimbangan	706.742.707.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.200.000.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	624.364.767.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	58.177.940.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	183.860.188.000
1.3.1	Hibah	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	32.900.000.000
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	136.791.475.000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya	14.168.713.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	955.231.419.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	33.754.000.000
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2015 (SILPA)	33.754.000.000

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2016
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-
3.1.7	Penerimaan Hutang daerah	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.754.000.000
	JUMLAH DANA YANG TERSEDIA (1. + 3.1)	988.988.419.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa total dana yang tersedia untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 988.988.419.000,- yang bersumber dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 955.234.419.000,- dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 33.754.000.000,-.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja SKPD (Renja). Penyusunan dokumen tersebut tidak terlepas dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016, yang merupakan rujukan mutlak SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Untuk menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka sinergitas program strategis, Pemerintah Daerah senantiasa mengacu pada amanah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanahkan perlunya menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional

Berkaitan dengan itu untuk Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memprioritaskan Program yang searah dengan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 yaitu :

1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah
3. Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis
4. Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
5. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran
6. Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan
7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik
8. Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka tema pembangunan Tahun 2016 yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2016 yaitu **“Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Didukung Oleh Peningkatan Infrastruktur Wilayah.”** Tema pembangunan tahun 2016 ini merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pembangunan tahun 2016 sebagaimana RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, maka program prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
I. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi				
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	200 Pol PP	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 yang tertangani	70 %	
		Persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani	70%	
		Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	11 Kecamatan
		Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
		Rasio fasilitas sarana dan prasarana pos kamling	75 Pos Kamling	
	Program kemitraan pengembang anwawasan kebangsaan	Cakupan peningkatan kapasitas orkesmas	50 org	
		Kapasitas FKUB dan FPK	4 Kali	
		Jumlah ORMAS/LSM	50 Org	
2. Peningkatan Stabilitas Ketertiban Umum	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan jam patroli petugas satpol PP dalam sehari tingkat kabupaten	-	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan jam patroli petugas satpol PP dalam sehari tingkat kecamatan	-	
		Angka kriminalitas	-	
		Deteksi dini dan pencegahan tindak kriminal	100%	Badan Kesbang dan Linmas

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
II. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah				
1. Meningkatkan dan Memelihara Kualitas prasarana Jalan dan Jembatan serta prasarana pendukung	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	83,10%	Dinas Bina Marga
2. Mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Terlaksana pembangunan Drainase/ Gorong- Gorong	80,00%	
	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Terbangunnya Talud untuk memperkuat Infrastruktur jalan	31,42%	
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Terpeliharanya Jalan Dan Jembatan	11,28%	
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di Perdesaan	32,57%	
3. Mengembangkan akses layanan komunikasi dan informasi, Membangun kerjasama dengan media massa dan Membangun prasarana informasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Peningkatan perencanaan, pengawasan, monitoring & pelaporan	90 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Program kerjasama dengan media massa	Persentase KIM dan internet keliling	80 %	
4. Penyelenggaraa penataan ruang yang terpadu	Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	2 Dok	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Pemanfaatan Ruang	Ratio RuangTerbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	2 lokasi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Penataan ruang publik dan ruang Terbuka Hijau yang efektif dan efisien	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau	-	Badan Lingkungan Hidup
		Terpeliharanya Taman dalam kab.	8 taman	Dinas Cipta Karya

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
		Sidrap		dan Tata Ruang
	Pengelolaan areal pemakaman	Ratio TPU per satuan penduduk	1 lokasi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya sistem informasi tata ruang	-	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kab/kota	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan sistem partisipatif	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi	3,45%	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Cakupan luas layanan areal irigasi yang dialiri	12.360 Ha	
	Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku	Rasio jaringan irigasi	3,45 %	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	75%	
	Program Pengendalian banjir	Cakupan areal terdampak yang tertangani	45%	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi partisipatif yang dilaksanakan	60%	
7. Mengembangkan sumber-sumber energy terbarukan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketanagalistrikan	Terkelolanya sumber2 energi terbarukan	46,90%	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi
III. Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis				
1. Meningkatkan dan membangun infrastruktur yang membuka akses	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan	19,13%	Dinas Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
antar wilayah		Panjang jalan lingkungan yang terbangun	3.300 m	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Membangun prasarana dasar infrastruktur Permukiman	Perencanaan, Pengawasan, Pengujian dan Pengendalian Mutu	Tersedianya dokumen perencanaan umum	8 Paket	Dinas Bina Marga
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Peningkatan penanganan kasus kebakaran	91%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3. Meningkatkan cakupan layanan air bersih	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong	Terlaksananya Pembangunan Drainase/Gorong – gorong	80,00%	Dinas Bina Marga
		Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	10,9 %	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah des/kel yang terlayani air bersih	5 Desa /kel	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rasio Jaringan Irigasi	3,45 %	PSDA
4. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi	Pengembangan, Pengeloaaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Luas irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	75%	PSDA
		Rumah tangga pengguna air bersih	3 Desa /kel	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Tersedianya Sumber Air Permukaan dan Air tanah dalam untuk kebutuhan pada Lahan sawah tadah hujan dan Perekbunan	100 Unit	Dinas pertanian dan perkebunan
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Rumah tangga ber Sanitasi	5 Desa /kel	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya infrastruktur jalan perdesaan	3.300 m	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Terbangunnya Infrastruktur	19,13%	Dinas Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
		Perdesaan		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa	Jumlah desa/kel yang terbangun infrastruktur perkotaan	12 Kel. Kec. MaritengngaE	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	100%	11 Kecamatan
	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Besar	Tersedianya dokumen perencanaan sanitasi	Up Dating MPS	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan cakupan layanan persampahan	60%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Ratio rumah tangga pengguna listrik	-	
5. Penataan kawasan Kumuh	Pengembangan Perumahan	Ratio Rumah/Permukiman Layak Huni	1 Kec	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6. Peningkatan koordinasi dan Mitigasi bencana alam	Program peningkatan mitigasi bencana alam geologi	Tersedianya data-data untuk mengantisipasi bencana alam geologi	60,00%	Dinas Kehutanan pertambangan dan energi
	Program Kedaruratan dan Logistik	Cakupan Penanganan kedaruratan dan logistik	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan Rehabilitasi dan rekonstruksi	100%	
IV. Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan				
1. Menjamin perlindungan konsumen	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen	2.50%	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
		Koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaporan	85%	Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
2. Meningkatkan daya saing UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan daya saing UMKM	0,48%	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3. Mengembangkan kemampuan permodalan	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Cakupan layanan fasilitas pembiayaan UMKM	1.756 UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif dari jum. Koperasi	50.9%	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
4. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kapasitas kompetensi 1500 AK	45%	Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi
5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya local	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapatkan perlindungan hukum	30%	Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi
6. Menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi Padi meningkat sampai 5 % per tahun	534.50 Ton	Dinas pertanian & perkebunan
		Produktivitas Padi	61,18 Ku/Ha	
		Produksi Jagung meningkat 2% per tahun	42.400 Ton	
		Produktivitas Jagung	61,18 Ton	
		Produksi Kedelai meningkat 1% / Tahun	614 Ton	

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
		Produksi Melon Meningkatkan 1% / Tahun (Ton)	88,20 Ton	
		Produksi Cabe Meningkatkan 1,5% / Tahun (Ton)	281 Ton	
		Produksi Kakao meningkat 3% / Tahun (Ton)	7.935 Ton	
		Produksi Jambu Mete meningkat 2% per tahun (Ton)	2.4 38 Ton	
		Produksi Cengkeh meningkat 5 % per tahun (ton)	591Ton	
		Produksi Lada meningkat 3 % per tahun (Ton)	87,49 Ton	
		Berkembangnya pertanaman kelapa sawit	50 Ha	
		Kelompok plasma kebun karet	3 Klp	
		Kontribusi sektor pertanian (Tanaman makanan dan perkebunan terhadap PDRB)	46,04%	
		Cakupan Penggunaan Pupuk Organik	20 Ha	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Demplot Produk Pertanian Organik	20 Ha/20 Klp	
		Jumlah Kelompok Penangkaran Benih	10 Ha	
		PERDA tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	100%	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
		Fasilitas akses permodalan	99 klp	Dinas pertanian & perkebunan
		Hand Traktor		

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
		Skala usaha	3 Klp	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan wirausaha kelompok wanita tani, UMKM dan koperasi	14 Klp	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Jumlah petani yang akan diberikan pemahaman tentang teknologi pertanian		Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		Jumlah BP3K (.....) yang mengikuti sosialisasi peningkatan produksi pertanian	11 BP3K	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Mesin Tanam (Unit)	10 unit	Dinas pertanian & perkebunan
		Hand Traktor (Unit)	200 Unit	
		Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani dan gapoktan.	70%	Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan
7. Meningkatkan kualitas hasil produksi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Padi (Tingkat Kehilangan Hasil)	9,21%	Dinas pertanian & perkebunan
		Jagung (Tingkat Kehilangan Hasil)	6,25%	Dinas pertanian & perkebunan
		Kualitas rendemen meningkat	56%	Dinas pertanian & perkebunan
	Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Promosi komoditi	Padi, Jagung, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete, Kopi, Melon dan Cabe	Dinas Pertanian & Perkebunan
8. Meningkatkan daya dukung ketersediaan sumber daya air	Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai,danau dan sumberdaya air lainnya	Sumber air tambahan untuk lahan areal sawah tadah hujan dan perkebunan	100 Unit	Dinas Pertanian & Perkebunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
9. Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan tani dan jembatan	Panjang jalan tani terbangun	30.000 Meter	Dinas Pertanian dan perkebunan
10. Pengembangan kapasitas pelaku usaha tani	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan	1 paket	Dinas Peternakan dan Perikanan
11. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian secara optimal	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani dan gapoktan.	70%	Badan Penyuluh Ketahanan Pangan
12. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian lapangan	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Kemampuan Teknis Penyuluh	75%	Instansi Terkait
		Jumlah Penyuluh yang telah mengikuti diklat dasar fungsional	*Terampil :- Org *Alih Kelompok: 5 Org *Ahli:2 Org	
		Peningkatan Jumlah latih dan kunjungan (LAKU) Fungsional Kabupaten di tingkat BP3K	88 LAKU	
		Peningkatan kemampuan penyuluh dalam penyusunan akreditasi	75%	
13. Mengembangkan akses pemasaran	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Cakupan fasilitasi perumusan kebijakan	80%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Penanaman Modal
14. Melanjutkan dan mengembangkan kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Kelompok penangkaran benih padi	10 Ha	Badan Penyuluh Ketahanan pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
15. Mempertahankan daya dukung hutan dan lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Terlaksananya penanaman /reboisasi pada kawasan hutan seluas 1.300 Ha	0.813%	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Enregi
16. Mencegah kerusakan sumber daya alam	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Koordinasi dan rumusan kebijakan sumber daya alam	80%	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
17. Meningkatkan daya dukung sumber daya air	Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai,danau dan sumberdaya air lainnya	Tersedianya Sumber Air Permukaan dan Air tanah dalam untuk kebutuhan pada Lahan sawah tadah hujan dan Perekbunan	100 Unit	Dinas Pertanian dan perkebunan
18. Menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya air	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ,dan rawa,jaringan pengairan lainnya	Cakupan pelayanan jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani	-	Dinas Pertanian dan perkebunan
19. Mendorong peningkatan produksi pertanian ramah lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup	80%	Bagian Sumber Daya Alam
20. Mendorong pengembangan produk pertanian organik	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Cakupan penggunaan pupuk organik	20 Ha	Badan Penyuluh Ketahanan Pangan
		Demplot produk pertanian organik	20 Ha/20 Klp	Badan Penyuluh Ketahanan Pangan
V. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran				
1. Mengembangkan infrastruktur pendukung	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	35 klp	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan peningkatan pelaku industri	71%	

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
2. Meningkatkan produktifitas UMKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah	Cakupan jumlah IKM aktif dan produktif	49%	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Cakupan jumlah IKM baru	-	
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	-	
		Pertumbuhan industri	-	
3. Meningkatkan akses informasi	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pertumbuhan industri	100%	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
4. Mengembangkan produktifitas masyarakat miskin	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (New Inisiatif)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	26,5%	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Daya Saing UMKM	0,48%	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Sistem informasi PM & promosi	80%	Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
		Terwujudnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	100%	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Koordinasi, perumusan kebijakan, pelaporan dan pembinaan BUD	85%	Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
		Jumlah dan nilai PMDN serta PMA (org dan IDR/dollar)	100 %	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif	Iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	80%	Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
5. Meningkatkan dukungan	Program penelitian dan	Meningkatnya informasi tentang	-	Badan Perencanaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
pengembangan kapet pare-pare sebagai kawasan strategis nasional	pengembangan potensi produk unggulan daerah	potensi dan prospek pengembangan potensi produk unggulan daerah		Pembangunan Daerah
VI. Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olah raga dan kebudayaan				
1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase kepuasan pasien	82%	RSUD NENE' MALLOMO
		Rumah Sakit lulus akreditasi	75%	RSUD ARIFIN NU'MANG
		Lulus akreditasi versi 2012 tingkat pratama	Terakreditasi	RSUD NENE' MALLOMO
		Tenaga dan sarana kesehatan yang bersertifikat	100%	DINAS KESEHATAN
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase pasien rawat inap :		RSUD NENE' MALLOMO
		* BOR	70%	
		* Av LOS	6 - 9 hari	
		* BTO	40-50 kali	
		* TOI	1-3 hari	
		* NDR	19%	
		* GDR	35%	
		Jumlah kunjungan RITL	7243 pasien	
		Jumlah kunjungan RJTL	24.066 pasien	
Persentase tenaga yang mendapat pelatihan minimal 20 jam (SPM RS)	40%			
3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Program upaya kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	84 %	RSUD Arifin Nu'Mang
		Pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan puskesmas	15%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	80%	

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
4. Peningkatan pelayanan kesehatan anak, balita dan gizi	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemantauan Status Gizi	3%	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Terpeliharanya kesehatan anak	23/2	
	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Terlaksananya penyuluhan	2 Ibu	
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat	Presentase Kematian Ibu, Bayi dan Anak	-	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
6. Pemerataan pembangunan kesehatan	Program Pengembagan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang menggunakan air minum sehat	96%	Dinas Kesehatan
7. Perlindungan kesehatan makanan	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	terjaminnya keamanan makanan	100%	Dinas Kesehatan
8. Penguatan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	Program Keluarga Berencana	Penurunan Total Fertility Rate (TFR) Kab.Sidrap dari 2,44 ke 2,6 di tahun 2018	TFR 2,35	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
		Rata-rata Jumlah anak per keluarga =2	2	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	68,5%	
	Unmet need = 17,33%		11%	
9. Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Presentase Jumlah pengunjung perpustakaan	-	Kantor Arsip dan perpustakaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
10. Peningkatan mutu layanan pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru berkwalifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan	97.00%	Dinas Pendidikan
		Guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	50.00%	
11. Mengembangkan akses pelayanan pendidikan	Program Layanan Pendidikan Tinggi (DIKTI)	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkuliahan yang berkualitas dan memadai serta kwalifikasi/kwalitas tenaga pendidik (Dosen) dan kependidikan yang berkompetensi	70.00%	
12. Peningkatan akses dan minat keolahragaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan prasarana olahraga	8,54%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
13. Pelestarian kekayaan budaya local	Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pementasan tim kesenian	-	
	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	69%	
14. Peningkatan akses pariwisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan kunjungan wisata dan mancanegara	60%	
15. Pemberdayaan kelompok pemuda	Peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan anggota kelompok Paskibraka yang terpilih dan dilatih	75%	
16. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan	Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial Keagamaan	Kesejahteraan Imam, Petugas Syara, Guru TPA, Muballigh, Tassbeh dan KIPRA	85%	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
17. Menciptakan kaharmonisan umat beragama	Peningkatan pembinaan FKUB	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
VII. Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik				
1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang kelembagaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang2an yang	100%	Bagian Organisasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
		berlaku		
	Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah serta Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang telah melaksanakan system dan prosedur ketatalaksanaan dengan jelas, efektif, efisien dan terukur	100%	Bagian Organisasi
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%)	100%	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Semua SKPD
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	100%	Badan Kepegawaian Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	50%	Badan Kepegawaian Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional bagi PNS Daerah	100%	
		Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	100%	
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian kinerja keuangan	100%	Semua SKPD
		Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkatkan Dari 60% Menjadi 100%	100%	Badan Pengelola Keuangan Daerah
4. Melaksanakan pelayanan prima	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Semua SKPD

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
5. Peningkatkan profesionalisme aparaturn pemerintah	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparaturn	100%	Semua SKPD
6. Peningkatan disiplin aparaturn pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	Semua SKPD
7. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Kualitas laporan keuangan SKPD sesuai SAP	100%	Inspektorat
8. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Status Pelayanan Kabupaten Pelayanan terhadap anak (Kabupaten Layak Anak)	AKB=25 ; AKI=2 ; SRA=10% ; TBA=40%	Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30% (2011)	15%	
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta = 6,76%	7%	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan = 97,14%	98%	
		Presentase SKPD yang menerapkan PPRG	70%	
9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PUG dan perlindungan Anak	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender	75%	Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan
		Penguatan Organisasi Gender dan Anak	85%	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
10. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang berstatus Swakarsa	10%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD	17%	
11. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya	100.0%	
12. Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undang	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan-Undangan	Tertib pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan	100%	Bagian Hukum
	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Presentase Peraturan Daerah	100%	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah (NEW)	Persentase penyelesaian kasus/penyidikan pelanggaran Perda dan peraturan bupati	-	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
13. Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Wawasan Kebangsaan	60 org	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
		Kapasitas FKUB	4 Kali	
14. Meningkatkan Pengurus Utama Gender dan Perlindungan Anak	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender	75%	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
15. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak	Program peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, Rasio KDRT = 0,01	75%	

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
16. Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase jumlah anggota BKB, BKR, BKL yang ber-KB		
VIII. Peningkatan subsektor peternakan sapi dalam menungjang perekonomian masyarakat				
1. Meningkatkan produksi sektor peternakan dan perikanan	Program PeningkatanProduksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak dan produksi hasil peternakan		Dinas peternakan dan perikanan
		Populasi Sapi	60.428 ekor	
		Populasi Kerbau	3.001 ekor	
		Populasi Kuda	1.111 ekor	
		Populasi Kambing	13.424 ekor	
		Populasi ayam ras pedaging	2.019.441 ekor	
		Populasi ayam buras	4.812.928 ekor	
		Populasi ayam ras petelur	3.145.002 ekor	
		Populasi Itik	581.394 ekor	
		Produksi daging sapi	732.828 Kg	
		Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB:	Rp.739.528.155	
		Konsumsi/kapita/tahun	2,64 Kg	
Koordinasi dan Rumusan Kebijakan peternakan	70%			
2. Mencegah perkembangan dan penularan penyakit ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	25%	
3. Meningkatkan akses pemasaran	Program Peningkatan	Jumlah rumah potong hewan	1 Unit	

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	KINERJA		SKPD
		INDKATOR KINERJA	TARGET	
	Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Kelompok Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	5 Klp 2 Kali	
4. Meningkatkan produktifitas perikanan budi daya dan tangkap	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	731,80 ton	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	3,230,5 ton ikan	
		Konsumsi ikan	42,77 Kg	
		Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB budidaya (Rp.000)	12.295.765	
		Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tangkap (Rp. 000)	58.349.450	
		Cakupan bina kelompok nelayan	37,34%	
		Cakupan Bina Kelompok Budidaya	68%	
5. Mengembangkan teknologi peternakan	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	3 klp	
6. Mengembangkan kawasan perikanan budi daya dan budi daya tangkap	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air laut, Payau dan Air Tawar	Jumlah ikan yang ditebar	3.624.790 ekor	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2016 disusun berdasarkan urusan Pemerintahan dan program/kegiatan dengan mengacu pada matriks prioritas belanja pembangunan dengan membandingkan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET.
1	2	3	4
	URUSAN WAJIB		
1.01	Pendidikan		
1.01.01	Dinas Pendidikan	45,928,889,000	
1.02	Kesehatan		
1.02.01	Dinas Kesehatan	25,000,000,000	
1.02.02	RSUD Nene Mallomo	33,889,444,000	
1.02.03	RSUD Arifin Nu'mang	10,567,404,000	
1.03	Pekerjaan Umum		
1.03.01	Dinas Bina Marga	55,000,000,000	
1.03.02	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	18,829,452,000	
1.03.03	Dinas PSDA	11,000,000,000	
1.06	Perencanaan Pembangunan		
1.06.01	BAPPEDA	31.136.944.000	
1.07	Perhubungan		
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	1,942,495,000	
1.08	Lingkungan Hidup		
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	2,968,912,000	
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil		
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Capil	1,530,000,000	
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
1.12.01	Badan KB & Pemberdayaan Perempuan	2,495,654,000	
1.13	Sosial		
1.13.01	Dinas Sosial & Nakertrans	1,515,000,000	
1.13.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	770,000,000	
1.15	Koperasi & Usaha Kecil Menengah		

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.15.01	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag	3,708,649,000	
1.18	Pemuda dan Olahraga		
1.18.01	Dinas PORA, Budaya & Pariwisata	1,679,680,000	
1.19	Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri		
1.19.01	Badan Kesbang dan Linmas	700,000,000	
1.19.02	Kantor Satpol PP	1,787,278,000	
1.20	Pemerintahan Umum		
1.20.01	DPRD		
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
1.20.03	Sekretariat Daerah		
	Bagian Umum dan Keuangan	14,470,398,000	
	Bagian Adm. Kesra	8,560,280,000	
	Bagian Adm Sumber Daya Alam	250,000,000	
	Bagian Adm. Kemasyarakatan	250,000,000	
	Bagian Adm. Pembangunan	921,843,000	
	Bagian Organisasi	320,000,000	
	Bagian Adm. Perek dan Pena. Modal	672,610,000	
	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	475,000,000	
	Bagian Humas	2,500,000,000	
	Bagian Hukum	750,000,000	
1.20.04	Sekretariat DPRD	12,745,567,000	
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	40,549,371,000	
1.20.07	Inspektorat Daerah	1,050,000,000	
1.20.08	Perwakilan	150,000,000	
1.20.09	Kecamatan Panca Lautang	337,213,000	
1.20.09	Kecamatan Tellu LimpoE	469,313,000	
1.20.09	Kecamatan Wattang Pulu	556,328,000	
1.20.09	Kecamatan Baranti	453,101,000	
1.20.09	Kecamatan Panca Rijang	529,857,000	
1.20.09	Kecamatan Kulo	184,823,000	
1.20.09	Kecamatan MaritengngaE	880,236,000	
1.20.09	Kecamatan Wattang Sidenreng	396,866,000	
1.20.09	Kecamatan Dua PituE	335,153,000	
1.20.09	Kecamatan Pitu Riawa	311,151,000	
1.20.09	Kecamatan Pitu Riase	269,589,000	
1.20.11	Dinas Pendapatan Daerah	4,486,542,000	
1.20.12	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	886,807,000	
1.21	Kepegawaian		
1.21.01	Badan Kepegawaian Daerah	1,680,524,000	
	Sekretariat Korpri	185,000,000	
	Ketahanan Pangan		
	Badan Ketahanan Pangan	1,000,000,000	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.22	Pemberdayaan Masyarakat & Desa		
1.22.01	Badan Pemb. Masyarakat & pemdes	3,128,924,000	
1.23	Kearsipan		
1.23.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan	350,000,000	
	URUSAN PILIHAN		
2.01	Pertanian		
2.01.01	Dinas pertanian dan Perkebunan	15,848,713,000	
2.01.03	Dinas Peternakan dan Perikanan	5,776,038,000	
2.02	Kehutanan		
2.02.01	Dinas Kehutanan, Pertambangan & Energi	2,400,000,000	
TOTAL		374.581.048.000	

4.2 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk matriks sebagaimana tercantum dalam lampiran pada naskah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan disempurnakan pada saat pembahasan masing-masing SKPD berdasarkan urusan pemerintahan.

4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Adapun plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
2.1.1	Belanja Pegawai	557.665.367.000
2.1.2	Belanja Bunga	7.654.000.000
2.1.3	Belanja Subsidi	-

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
2.1.4	Belanja Hibah	2.360.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	37.971.004.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
	<i>Total Belanja Tidak Langsung</i>	<i>610.650.371.000</i>

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Pembiayaan Daerah untuk tahun anggaran 2016 diprediksi dengan target penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 33.754.000.000,- yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015 (SILPA). Sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 3.754.000.000,- yang diperuntukkan untuk Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Tabel 5. 1
Rincian Tentang Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>33.754.000.000</i>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015 (SILPA)	33.754.000.000
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-
3.1.7	Penerimaan hutang	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	33.754.000.000
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	<i>3.754.000.000</i>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo	3.754.000.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	3.754.000.000
	Pembiayaan Netto	30.000.000.000
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	-

BAB VI PENUTUP

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016 yang dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016.